

## DESAIN MODEL *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENANGANAN PENGURANGAN PENGGUNAAN PLASTIK

### DESIGN OF *COLLABORATIVE GOVERNANCE* MODEL IN HANDLING PLASTIC USE REDUCTION

Cecep Wahyudin<sup>1\*</sup>, Oetje Subagdja<sup>2</sup>, Abubakar Iskandar<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas  
Djuanda, Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Ciawi, Bogor, Jawa Barat 16720, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda, Jl. Tol  
Ciawi No. 1, Kotak Pos 35, Ciawi, Bogor, Jawa Barat 16720, Indonesia

\*Korespondensi: Cecep Wahyudin. Email: cecep.wahyudin@unida.ac.id

(Diterima: 08-02-2023; Ditelaah: 10-03-2023; Disetujui: 02-10-2023)

#### ABSTRACT

Reducing the use of plastic is an important issue in handling plastic waste, a national problem as the main pollution element causes air, soil, and water pollution and various environmental and ecosystem damage where human and natural resources develop. The collaborative concept of governance in reducing the use of plastic becomes a government study in a beautiful environment without plastic. The purpose of this research is to design collaborative governance models that can affect the development of plastic use; This research method uses qualitative with a descriptive approach. Informants of this research are government, private/business actors, and the community. The study results showed collaborative governance between the government, the private sector, and the community. However, there still needs to be an increase in collaboration so that it needs to develop in reducing plastic use. The level of collaborative governance concept in reducing the use of plastic in Bogor regency is oriented to a structured process in which there is a constructive involvement of actors with various actions carried out by the government level, private institutions/business actors, and the community in reducing the use of plastic.

**Keywords:** Collaborative Governance, Community, Government, Plastic Waste, Private Sector.

#### ABSTRAK

Pengurangan penggunaan plastik merupakan isu penting penanganan limbah sampah plastik yang menjadi permasalahan nasional sebagai unsur polusi utama menyebabkan pencemaran udara, tanah dan air serta berbagai kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem tempat sumber daya manusia dan alam berkembang. Konsep kolaboratif governansi dalam pengurangan penggunaan plastik menjadi kajian pemerintahan dalam lingkungan asri tanpa plastik. Tujuan penelitian ini adalah merancang model *collaborative governance* yang dapat mempengaruhi pengembangan pengurangan penggunaan plastik. Metode penelitian ini yaitu menggunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan penelitian ini adalah pemerintah, swasta/pelaku usaha dan masyarakat. Hasil penelitian diperoleh terdapatnya *collaborative governance* antara pemerintah, swasta dan masyarakat, namun masih perlu adanya peningkatan dalam melakukan kolaborasi sehingga perlu pengembangan dalam pengurangan penggunaan plastik. Tataran konsep *collaborative governance* dalam pengurangan penggunaan plastik di kabupaten bogor berorientasi pada suatu proses terstruktur yang di dalamnya terdapat pelibatan aktor-aktor secara konstruktif dengan berbagai tindakan yang dilakukan tataran pemerintahan, institusi swasta/pelaku usaha serta masyarakat dalam mengurangi penggunaan plastik. Penelitian ini akan berdampak pada pihak pemerintah, swasta dan masyarakat yang dapat memengaruhi kenyamanan, kesejahteraan, kesehatan dan keasrian pada lingkungan.

**Kata kunci:** Collaborative Governance, Masyarakat, Pemerintah, Sampah Plastik, Sektor Swasta.

## PENDAHULUAN

Sampah plastik merupakan suatu unsur polusi utama yang mengakibatkan kerusakan pada air, tanah dan udara serta kerusakan pada lingkungan hidup ekosistem. Memelihara lingkungan sumber daya manusia dan alam merupakan suatu kewajiban yang harus pemerintah Indonesia lakukan, demi terwujudnya lingkungan bersih dan sehat terutama dari limbah plastik yang sejalan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, bentuk perwujudan salah satu keinginan bangsa dalam proses pembangunan nasional serta hak asasi bagi seluruh warga Indonesia, hal tersebut sesuai amanat yang tertuang pada pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pencegahan permasalahan terhadap lingkungan dengan upaya pengendalian terhadap dampak negatif dari plastik seperti terjadinya polusi dan banjir akibat pembuangan limbah sembarangan dapat mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat Pemerintah Kabupaten Bogor melalui salah satu program Pancakarsa Bogor Sehat, meresmikan peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2019 tentang program Asri Tanpa Plastik (ANTIK) pada 17 Agustus 2019.

Permasalahan lingkungan hidup sudah teridentifikasi sejak lama dan tidak dapat dipungkiri dalam setiap harinya serta menjadi suatu permasalahan nasional. Oleh karena itu diperlukan langkah kongkrit sehingga dapat mengurangi tingkat pencemaran dan kerusakan pada lingkungan hidup. Kajian perubahan penggunaan kantong plastik menjadi kantong ramah lingkungan melalui transformasi industri dalam jumlah besar pada tahun 2017 hingga 2021 dengan menggunakan analisis database Google Scholar menggunakan tinjauan bibliometric (Wahyudin, et al., 2023).

Salah satu aspek permasalahannya ialah pembuangan limbah plastik. Limbah plastik di Kabupaten Bogor merupakan penyumbang limbah terbanyak mempunyai kisaran sebanyak 2.800 ton per hari (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor, 2019). *Collaborative governance* dalam penanganan pengurangan penggunaan plastik melibatkan pihak pemerintah, swasta dan masyarakat belum sepenuhnya diberlakukan kepada semua pihak pada era 4.0. Akibatnya banyak transaksi dilakukan secara online dan pengiriman menggunakan ekspedisi yang menggunakan plastik sehingga masih terjadinya penumpukan plastik yang begitu banyak. Oleh karena itu perlu dikaji lebih dalam terkait dinamika, aksi dan dampak *collaborative governance* dalam pelaksanaan penanganan pengurangan penggunaan plastik di Kabupaten Bogor. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat mempunyai kaitan yang erat dengan perilaku membuang sampah sembarangan dan mencemari lingkungan (Zitri, Lestanata, Darmansyah, Amil, & Umami, 2022) dan perlu adanya keterlibatan masyarakat local dalam perlindungan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran public (Azmy & Amanda, 2022). Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan mengakibatkan pada penumpukan sampah (Rusadi & Setiawan, 2021).

Hidayanti & Efendi (2020) menerangkan praktik tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah dengan teori tata kelola kolaboratif mencakup kepercayaan antar partisipan, pembagian tanggung jawab, jenis struktur jaringan, tata kelola, komitmen terhadap tujuan, pertukaran informasi, akses terhadap sumber daya dan akses terhadap kekuasaan yang harus dijalankan oleh pemerintah ketika melaksanakannya. dianggap kurang berhasil karena banyaknya indikator ekologi politik dan pembangunan berkelanjutan yang kurang memuaskan.

Dengan demikian, *state of the art* dalam penelitian ini yaitu adanya peninjauan penelitian dari perspektif teori yang berbeda dan lebih menekankan pada *collaborative governance* sehingga dapat menghasilkan suatu model *collaborative governance* dalam penanganan pengurangan penggunaan plastik di Kabupaten Bogor.

Febrian (2016) menunjukkan bahwa konsep Collaborative Governance sebagai landasan alternatif dinilai mampu mencapai percepatan dan penyelenggaraan kawasan perdesaan sebagai solusi bagi pihak-pihak yang akan mengembangkan dan melaksanakan perdesaan dalam bentuk kebijakan atau penelitian. Utami et al., (2020) menyatakan bahwa efektifitas program bogor tanpa kantong plastik secara signifikan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap lingkungan. Normajatun & Haliq (2020) implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastic berjalan dengan baik namun masih terdapat kendala dari masyarakat antara lain buruknya respon masyarakat terhadap sulitnya mengubah kebiasaan masyarakat yang selalu menggunakan kantong plastik. Selain itu, masyarakat juga masih kurang memahami mengenai pembagian keranjang yang dilakukan pemerintah.

Asmadianto, Arfah, & Krismiyati, (2020) menyebutkan bahwa larangan Kantong Plastik di Biak belum efektif karena kesiapan masyarakat dan sanksi yang belum memadai. Kebijakan tersebut tidak terlalu efektif. Hermawan (2021) menyatakan bahwa pegawai telah memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan perannya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dari sisi kepemimpinan, Walikota Bogor berhasil mendorong kerja sama yang efektif antar ketiga departemen untuk menjadikan permasalahan bantuan sebagai masalah bersama. Dalam pengelolaan bantuan sosial, pengelolaan yang dilakukan mencerminkan ciri-ciri New Public Service (NPS) sehingga kerjasama berjalan efektif dimana-mana. Kebijakan kolaboratif untuk mengatasi permasalahan data penerima bantuan

memerlukan input yang jauh lebih sedikit dibandingkan output.

Bachtiar (2021) mengatakan terdapat dua factor yang dapat mempengaruhi proses pengurangan penggunaan plastik diantaranya partisipasi masyarakat yang menjadi pengguna kantong plastik dan dari pihak pengelola toko sebagai pihak yang secara langsung mempunyai keterlibatan dalam kebijakan pengurangan penggunaan plastik. Trisniati et al., (2022) collaborative governance diukur berdasarkan empat indicator, yaitu: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, proses kolaborasi yang menyatakan terdapatnya ketidak seimbangan sumberdaya antara pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, masyarakat, akademisi dan media), masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, keamanan, dan ketertiban daerah sehingga perlu ditingkatkan kembali kesadaran masyarakat, upaya kolaborasi masih dilakukan masing-masing oleh para pemangku kepentingan.

Tujuan Khusus dalam penelitian ini untuk merancang model *collaborative governance* yang dapat memengaruhi pengembangan penanganan pengurangan penggunaan plastik. Studi kelayakan dalam studi ini pada umumnya yang sering digunakan oleh masyarakat dalam mengurangi bertambahnya limbah plastik yaitu dengan cara melakukan pembakaran sampah plastik, akan tetapi proses pembakaran sampah plastik, dapat mengurai partikel yang terkandung dalam plastik secara sempurna sehingga asap akan menimbulkan dioksin pada udara, dampak asap dioksin yang dihirup oleh manusia dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Adapun cara yang paling efektif dalam menanggulangi jumlah penimbunan sampah plastik yaitu dengan cara mengurangi penggunaan plastik, pengolahan limbah plastik dan penggunaan plastik biodegradable yang lebih mudah terurai di alam, hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Nasution, 2015).

## MATERI DAN METODE

### *Collaborative Governance*

Konteks Kolaborasi untuk mengatasi masalah sampah plastik dengan menjabarkan peran setiap aktor kolaborasi di level strategis, operasional dan teknis (Chotimah, Iswardhana, & Rizky, 2022). Konsep *collaborative governance* merupakan suatu bentuk konsep dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif. Dalam penerapan suatu kebijakan atau pelaksanaan program, pihak pemerintah tidak selalu memfokuskan pada kemampuan *internal* yang dimiliki akan tetapi pemerintah dapat bekerjasama dengan berbagai pihak antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Hal ini karena terdapatnya keterbatasan kemampuan, sumberdaya ataupun jaringan sehingga dapat mendorong pemerintah dalam bentuk kerjasama pemerintahan kolaboratif untuk mencapai tujuan kebijakan atau tujuan program.

*Collaborative governance* dapat diartikan suatu proses dalam pengambilan keputusan bersifat kolektif dan formal yang ditetapkan dalam pengaturan pemerintahan oleh satu lembaga publik atau lebih yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan non-publik dan berorientasi pada *consensus* serta musyawarah dengan tujuan membuat dan menerapkan kebijakan publik dalam mengelola suatu asset atau program publik (Ansell & Gash, 2007). Kolaboratif *governance* adalah proses terstruktur dengan melibatkan berbagai aktor dalam manajemen perumusan kebijakan publik sehingga dapat mencapai tujuan publik secara bersama-sama yang dilakukan oleh berbagai level pemerintahan/instansi publik, swasta maupun masyarakat sipil (Emerson et al., 2012). *Collaborative* merupakan suatu pendukung pada pelaksanaan *Governance* yang menekankan pada proses kesepakatan dari berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah namun juga

melibatkan masyarakat ataupun lembaga non pemerintah dalam melakukan tindakan kolektif serta kerjasama yang terdiri dari empat tahapan diantaranya : *assessment, initiation, deliberation* dan *implementation* (Morse & Stephens, 2012).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Islami et al. (2020) penelitiannya menunjukkan hasil bahwa implementasi kebijakan tersebut sudah baik. Hal ini sejalan dengan terdapatnya suatu penerapan program yang dilaksanakan sesuai dengan aturan sehingga angka penurunan penggunaan kantong plastik menurun secara signifikan. Selain itu, dalam implementasi kebijakan peraturan tersebut menunjukkan terdapatnya tingkat konflik dan tingkat ambiguitas yang rendah dalam *administrative implementation* jika dibandingkan dengan sasaran kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan masyarakat pengguna. Dengan demikian dapat ditemukan pemahaman masyarakat yang rendah mengenai lingkungan. Arrozaaq (2016) Hasil penelitiannya menunjukkan sudah adanya komponen-komponen yang memenuhi kriteria dalam proses kolaborasi antar stakeholder menurut krik emerson dalam peningkatan kawasan minapolitan di Kabupaten Sidoarjo. selain itu, proses kolaborasi yang dilakukan dimulai dengan penggerakan prinsip bersama, motivasi bersama serta pembentukan kapasitas bersama sehingga hal demikian dapat membentuk suatu tindakan kolaborasi yang dapat memberikan dampak sementara.

Pengembangan model yang dilakukan mengacu pada proses kolaborasi serta merupakan suatu tahapan sangat penting untuk diperhatikan, dalam tahapan model kolaborasi sebagai suatu strategi terhadap aspek pengelolaan berbagai urusan publik. Proses kolaboratif dalam pelaksanaannya pasti akan terasa sulit karena adanya perbedaan karakter-karakter dari setiap lembaga atau organisasi satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini, teori proses kolaborasi yang cocok dan dapat menjawab

suatu permasalahan dalam penulisan ini yaitu menurut *Emerson et al* (2012) dengan menggunakan teori *Collaborative Governance Regime* (CGR) yang dapat menjadi proses kolaborasi antarlain: 1). Dinamika kolaborasi, 2). Tindakan-tindakan kolaborasi dan 3). Dampak sementara serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata atau tulisan, dan perilaku yang dapat diamati dari subjeknya sendiri. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan secara komprehensif dan melalui uraian dalam bentuk kata-kata dan bahasa, dalam konteks alam tertentu dan menggunakan alam yang berbeda (Moleong, 2018). Dengan demikian pemilihan metode ini digunakan untuk memberikan gambaran secara deskriptif mengenai *collaborative governance* dalam penanganan pengurangan penggunaan plastik di Daerah Kabupaten Bogor.

Teknik dalam penentuan informan yang dapat memberikan sumber data dapat di klasifikasi informan menurut Suyanto (2005) dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: informan kunci adalah pemerintah Dinas Lingkungan Hidup, Informan utama adalah swasta/pelaku usaha dan informan tambahan adalah masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mengacu pada macam-macam teknik pengumpulan data yang dikemukakan oleh Sugiyono (2018) Observasi, Wawancara, Dokumentasi, dan Triangulasi. Analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan aktivitas analisis kualitatif menurut Miles & Huberman (2009) yang

terbagi kedalam tiga aktivitas utama yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi. Analisis deskriptif digunakan karena untuk menggambarkan hasil penelitian tentang *collaborative governance* dalam penanganan pengurangan penggunaan plastik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

*Collaborative governance* dalam pengurangan penggunaan plastik mempengaruhi keasrian lingkungan di daerah. Konsep *collaborative governance* dapat dinilai efektif apabila inisiasi, musyawarah dan implementasi dapat berlangsung secara baik yang sesuai dengan aspek-aspek yang telah ditentukan dalam penilaiannya. Pengembangan model *collaborative governance* dalam penanganan pengurangan penggunaan plastik penting dilakukan dalam rangka meningkatkan keberhasilan menciptakan lingkungan yang asri tanpa plastik sehingga menciptakan lingkungan sehat, nyaman dan bersih. Dengan demikian, perlu adanya pengembangan konsep model *collaborative governance* yang dapat mempengaruhi penanganan pengurangan penggunaan plastik.

Konteks penanganan pengurangan penggunaan plastik, pengembangan model *collaborative governance* menjadi penting terutama dalam mendorong pemerintah, swasta dan masyarakat untuk meningkatkan tingkat kesadaran dalam penanganan pengurangan penggunaan plastik. Salah satu elemen penting dalam penanganan limbah sampah khususnya plastik yaitu dengan menggunakan konsep pengurangan penggunaan plastik. Pengurangan penggunaan plastik telah menjadi isu penting dalam pembangunan, karena telah disadari bahwa penumpukan limbah plastik dapat mengakibatkan pencemaran pada lingkungan dan menimbulkan berbagai macam penyakit yang ditimbulkan. Oleh karena itu, target penurunan sampah plastik perlu didukung

melalui sinergi semua elemen pemangku kepentingan (Hermawan & Astuti, 2021).

Dalam perkembangannya, Kabupaten Bogor dipandang sebagai kabupaten yang mempunyai penduduk lebih banyak dibandingkan dengan kabupaten lainnya sehingga memiliki potensi lebih banyak dalam unsur pengelolaan ataupun unsur pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*. Dalam unsur pengurangan terdapat beragam pihak swasta/pelaku usaha yang menjadi sasaran, sejauh ini masih adanya keterbatasan dalam sasaran sehingga perlu adanya penambahan atau peningkatan saran dalam pengurangan penggunaan plastik untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman dan aman dari limbah plastik. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Uljanatunnisa, Sutowo, Mahdalena, & Handayani (2022) bahwa sampah menjadi ancaman sehingga upaya pencegahan dan pengelolaan sampah bertumpu pada pengurangan dan penanganan sampah. Selain itu, perlu adanya tanggung jawab individu, pemerintah dan korporasi besar terkhusus industry plastic untuk melakukan perubahan dalam mengatasi permasalahan polusi plastic (Chotimah, 2023).

Oleh karena itu, dalam upaya pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam* di Kabupaten Bogor maka alternatif yang dilakukan yaitu melalui pendekatan proses kolaboratif (Emerson et al., 2012). Pendekatan ini meliputi beberapa dimensi di antaranya: dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan dalam kolaborasi, serta dampak dan adaptasi hasil tindakan pada dinamika kolaborasi.

## 1. Dinamika Kolaborasi

Hubungan kerjasama yang dilakukan antara pemerintahan Dinas Lingkungan hidup, swasta/pelaku usaha dan masyarakat merupakan siklus interaksi yang dapat menciptakan keterpaduan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik, sedotan plastik dan *styrofoam*. Hal

ini dapat ditandai dengan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi proses dinamika kolaborasi, di antaranya:

a). Penggerakan prinsip bersama dapat dibangun dengan melakukan kerjasama yang ditandai dengan terdapatnya suatu kebijakan pengurangan penggunaan plastik secara tertulis berupa Perbup nomor 13 tahun 2019 serta adanya pengakuan dari pihak swasta/pelaku usaha dan masyarakat sehingga pengurangan penggunaan kantong plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* dapat terealisasi dengan baik walaupun pada pelaksanaannya belum diberlakukan secara menyeluruh melainkan baru diberlakukan kepada pelaku usaha yang meliputi: pusat perbelanjaan, toko modern, restoran, hotel, dan café. Mengukur terdapatnya penggerakan prinsip bersama dalam suatu *collaborative governance* sehingga pengurangan penggunaan plastik terealisasi dengan baik maka dapat dilihat dari aspek *discovery* yang ditandai dengan adanya suatu minat secara bersama-sama antara pemerintah, swasta/pelaku usaha dan masyarakat, definition yang ditandai dengan terdapatnya keberlanjutan program dalam pengurangan penggunaan kantong plastik, sedotan plastik dan *styrofoam* yang diterapkan oleh pihak swasta/pelaku usaha tidak lagi menyediakan kantong dan sedotan plastik sedangkan masyarakat selalu membawa kantong plastik saat berbelanja ataupun membeli kantong ramah lingkungan, deliberation yang ditandai dengan pada tahap awal sering kali adanya pro kontra, namun Dinas Lingkungan Hidup dapat menampung berbagai aspirasi sehingga dengan adanya kerjasama yang dilakukan maka sudah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam* dan determination yang ditandai dengan terdapatnya suatu harapan pemerintah daerah, swasta/pelaku usaha dan masyarakat dalam mewujudkan daerah yang sehat, bersih dan aman khususnya dari ancaman limbah plastik serta selaras

dengan maksud dan tujuan kabupaten bogor dalam karsa sehat dan karsa membangun.

b). Motivasi bersama dapat dibangun dengan menumbuhkan kesadaran dan keinginan melalui advokasi, pendampingan dan sosialisasi sehingga dapat menumbuhkan rasa semangat bagi pemerintah, swasta/pelaku usaha dan masyarakat dalam pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*. Hal ini bisa diukur dengan siklus yang dapat menguatkan motivasi, ditandai dengan: mutual trust yang ditandai dengan terdapatnya rasa saling percaya antara pihak pemerintah, swasta/pelaku usaha dan masyarakat sehingga menumbuhkan prioritas kepentingan dalam pengurangan penggunaan kantong plastik sedotan plastik dan *styrofoam*, mutual understanding yang ditandai dengan terdapatnya kesepahaman baik dalam segi manfaat ataupun dampak dari pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*, internal legitimacy yang ditandai dengan terdapatnya legalitas dari pemerintah daerah berupa pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 2 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah dan Peraturan Bupati No 13 tahun 2019 tentang pengurangan penggunaan *plastic dan styrofoam*, yang dapat menjadi tuntutan-tuntutan yang harus dijalankan dalam merealisasikan pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam* serta commitment yang ditandai dengan adanya keberlanjutan yang dilakukan oleh pihak pemerintah, swasta/pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*.

c). Kapasitas melakukan tindakan bersama dapat ditandai dengan terdapatnya interaksi-interaksi yang dapat membangun suatu tindakan yang harus dilakukan bersama-sama antara pihak pemerintah Dinas Lingkungan Hidup, swasta/pelaku usaha dan masyarakat sehingga dapat memperkuat prinsip dan

tujuan dalam pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*. Hal demikian dapat digambarkan dengan melihat elemen-elemen yang dapat memperkuat kapasitas melakukan tindakan bersama, ditandai dengan: procedural and institutional arrangements yang dapat ditandai dengan terdapatnya buku saku yang menjadi pedoman dalam menjalankan pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam*, *leadership* dapat ditandai dengan terdapatnya kolaborasi yang efektif dalam melakukan pengurangan penggunaan plastik antara pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup, swasta/pelaku usaha yang meliputi pusat perbelanjaan, toko modern, restaurant, hotel dan café sehingga dapat mengurangi permasalahan penumpukan sampah sekitar 15% yang diakibatkan oleh sampah plastik, knowledge dapat ditandai dengan terdapatnya kesepahaman akan pentingnya menjaga lingkungan sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tidak lagi menggunakan kantong plastik dan *styrofoam* karena sudah tidak tersedia lagi di pusat perbelanjaan, toko modern, *restaurant*, hotel dan *cafe*, serta *resource* dapat ditandai dengan adanya keberhasilan dalam pengurangan penggunaan plastik dan *styrofoam* yang diterapkan oleh pusat perbelanjaan, toko modern, restaurant, hotel dan café karena adanya manajemen sumber daya yang dapat menjalin koordinasi dengan baik antara pemerintahan, swasta/pelaku usaha dan masyarakat.

## 2. Tindakan-tindakan Kolaborasi

Adapun tindakan kolaborasi yang dilakukan ditandai dengan upaya-upaya dalam menjaga keberlangsungan pengurangan penggunaan plastik supaya tetap berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dapat diukur berdasarkan kondisi lapangan melalui aspek-aspek sebagai berikut:

a). Kejelasan tujuan yang ditandai dengan ketentuan tujuan pengurangan

penggunaan plastik dan styrofoam melalui program Asri Tanpa Plastik (ANTIK) tertuang dalam peraturan Bupati nomor 13 tahun 2019. Dalam hal kejelasan tujuan dapat dilihat dari sasaran program ANTIK dalam pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam sudah dijalankan oleh pusat perbelanjaan, toko modern, restaurant, hotel dan café. Ideal dapat dilihat dari program ANTIK yang mempunyai kesesuaian dengan perkembangan zaman. Realistis dapat ditandai dengan terdapatnya kesesuaian antara konsep yang telah ditetapkan dengan realita dilapangan dalam pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam melalui program ANTIK. Sosialisasi dapat ditandai dengan terdapatnya surat edaran yang memberitahukan bahwa adanya pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam melalui program ANTIK yang di informasikan kepada pihak swasta/pelaku usaha sehingga informasi tersebut diteruskan kepada para masyarakat yang berkunjung/berbelanja melalui program masing-masing pelaku usaha.

b). Penentuan langkah strategis dapat ditandai dengan terdapatnya suatu langkah-langkah yang dapat menjaga keberlangsungan program ANTIK sehingga terdapatnya pengembangan rencana dalam pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam. Dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya: ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan, alternative pengganti plastik dan adanya dukungan terhadap produsen tanpa plastik.

c). Monitoring yang dilakukan dapat ditandai adanya pengontrolan dan pendampingan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup yang dapat membuahkan penghargaan ataupun teguran, akan tetapi belum adanya realisasi pemberian penghargaan ataupun teguran kepada pelaku usaha yang menjalankan atas keberlangsungan program ANTIK dalam pengurangan penggunaan plastik selain itu terdapat juga adanya dukungan dari

masyarakat dalam pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam.

### 3. Dampak dan Adaptasi Hasil Tindakan

Adapun dampak yang ditimbulkan dan proses adaptif dari kolaborasi dilihat dari proses kolaborasi yang terjadi antara pemerintah, swasta/pelaku usaha dan masyarakat sehingga dapat dilihat dari aspek-aspek yang dapat mempengaruhi di antaranya:

a). Karakteristik dampak dapat ditandai dengan terdapatnya dampak yang diakibatkan oleh belum menyeluruhnya kolaborasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup yang baru dilaksanakan dengan pihak swasta/pelaku usaha dan masyarakat sedangkan kolaborasi dengan dinas-dinas yang terkait dengan pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam masih belum ada kolaborasi yang dibentuk untuk mendukung secara penuh program ANTIK. Namun pengurangan penggunaan plastik dapat mencapai 15% pengurangan plastik dan styrofoam yang baru diterapkan di pusat perbelanjaan, toko modern, restaurant, hotel dan café, sedangkan toko-toko lainnya seperti toko kelontongan, pasar tradisional, toko online dan sejenisnya masih belum diberlakukan dalam pengurangan penggunaan plastik, sedotan plastik dan styrofoam.

Selain itu terdapat juga dampak yang ditimbulkan seperti diharuskan membeli kantong pengganti plastik dengan harga yang cukup mahal saat lupa membawa kantong belanja dari rumah dan juga masih adanya keterbatasan penyediaan kantong ramah lingkungan seperti kantong yang terbuat dari serat singkong. Dalam mengukur dampak yang ditimbulkan maka dapat dilihat dari aspek-aspek terdapatnya keramahan lingkungan, dapat menjaga kesehatan dan keselamatan, menjaga kelangsungan kehidupan, adanya kecenderungan penggunaan, adanya



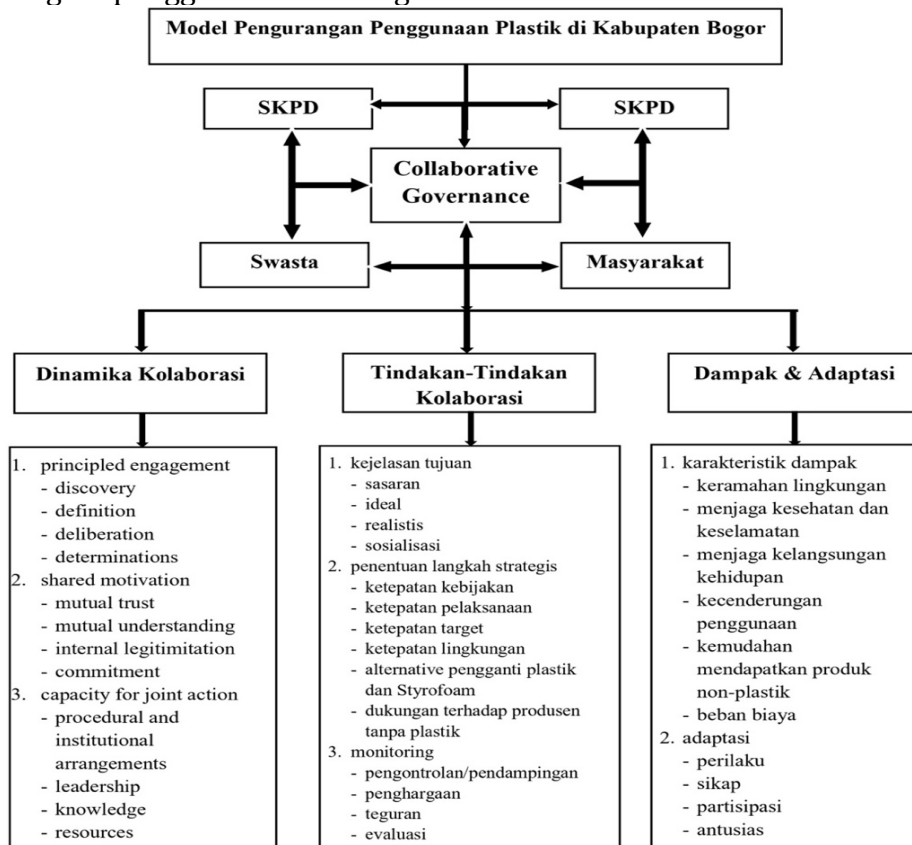
kemudahan mendapatkan pengganti plastik serta beban biaya yang bebankan.

b). Adaptasi yang dilakukan dapat dilihat dari respon yang diberikan oleh pihak swasta/pelaku usaha dan masyarakat sehingga mereka harus menyesuaikan dengan kondisi yang sedang diberlakukan pada saat ini. Hal ini dapat ditandai dengan adanya perilaku, sikap, partisipasi dan antusias dari pihak swasta/pelaku usaha dan masyarakat terhadap melakukan pengurangan penggunaan plastik.

Rancangan model *collaborative governance* dalam pengurangan penggunaan plastik di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari pemikiran logis berdasarkan kenyataan yang meyederhanakan tentang keterkaitan antara kebutuhan, potensi dan masalah sehingga dapat dideskripsikan berdasarkan dengan teori dan hasil penelitian. Pada dasarnya upaya kolaborasi pemerintah, swasta/pelaku usaha dan masyarakat dalam pengurangan penggunaan kantong

plastik, sedotan plastik di Kabupaten Bogor sudah ada upaya namun belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih terdapat batasan dalam pengelolaannya.

Melihat hal ini, pemerintah membutuhkan kolaborasi yang harus dibangun, yaitu antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan SKPD lainnya, SKPD dengan swasta, SKPD dengan masyarakat dan swasta dengan masyarakat. Dengan demikian maka dapat terjalannya suatu kerjasama yang dapat membawa perubahan dalam pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam sehingga tujuan Kabupaten Bogor dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman dan aman dari limbah yang mengakibatkan berbagai ancaman dapat terwujud yang dibuktikan dengan adanya kesejahteraan dalam lingkungan hidup masyarakat. Dengan demikian, model pengurangan penggunaan plastik di kabupaten bogor, dapat dirumuskan pada Gambar 1.



Gambar 1. Model *Collaborative Governance* dalam Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bogor

Model *collaborative governance* dalam pengurangan penggunaan plastik di Kabupaten Bogor yaitu melalui pendekatan proses kolaboratif (Emerson et al., 2012). Pendekatan ini meliputi beberapa dimensi diantaranya: dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan dalam kolaborasi serta dampak dan adaptasi hasil tindakan pada dinamika kolaborasi.

Dinamika kolaborasi mengacu pada hubungan kerjasama yang dilakukan dalam pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam yang dilakukan antar instansi ataupun individu sehingga adanya keterpaduan dalam pelaksanaan program dengan memberikan kedudukan dan fungsi yang sama pada saat pelaksanaannya. Dinamika kolaborasi dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu: (1) *principled engagement* yang ditandai dengan aspek discovery, definition, deliberation dan determinations, (2) *shared motivation* yang ditandai dengan mutual trust, mutual understanding, internal legitimitation, dan commitment, (3) *capacity for joint action* yang ditandai dengan aspek procedural and institutional arrangements, leadership, knowledge dan resources.

Tindakan-tindakan dalam kolaborasi mengacu pada proses pelaksanaan yang dilakukan sehingga dapat menjamin keberlangsungan suatu program ANTIK dalam pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam yang dapat diukur dengan indikator-indikator berdasarkan kondisi lapangan, yaitu: (1) kejelasan tujuan yang ditandai dengan aspek sasaran, ideal, realistis dan sosialisasi, (2) penentuan langkah strategis yang ditandai dengan aspek ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan, alternative pengganti plastik dan styrofoam serta dukungan terhadap produsen tanpa plastic, (3) *monitoring* yang ditandai dengan pengontrolan dan atau pendampingan, penghargaan, teguran dan evaluasi.

Dampak dan adaptasi hasil tindakan pada dinamika kolaborasi mengacu pada

proses kolaborasi pada hubungan kerjasama dan proses pelaksanaan yang dilakukan sehingga dapat diukur dengan berdasarkan indikator-indikator yang dapat mempengaruhi, di antaranya: (1) karakteristik dampak yang ditandai dengan keramahan lingkungan, menjaga kesehatan dan keselamatan, menjaga kelangsungan kehidupan, kecenderungan penggunaan, kemudahan mendapatkan produk non-plastik dan beban biaya, (2) adaptasi yang ditandai dengan perilaku, sikap, partisipasi dan antusias.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya limbah plastik sehingga banyak menyebabkan dampak negatif khususnya bagi manusia dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan penggunaan plastik memerlukan kolaborasi yang kuat baik dari pihak pemerintah, swasta maupun masyarakat sehingga dengan adanya pengurangan plastik dapat terciptanya keramahan, kenyamanan, kesejahteraan, kesehatan, dan keasrian lingkungan.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diharapkan dapat membantu proses *collaborative governance* dalam pengurangan penggunaan plastik di Kabupaten Bogor sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dalam menjalin *collaborative governance* untuk pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam sehingga dapat meningkatkan kerjasama yang dilakukan tidak hanya dengan swasta/pelaku usaha dan masyarakat saja melainkan harus melakukan kerjasama dengan sesama dinas yang dapat mendukung program ANTIK dalam pengurangan

- penggunaan plastik dan styrofoam seperti berkolaborasi dengan Dinas UMKM yang di dalamnya terdapat banyak pelaku usaha sehingga dapat diarahkan untuk melakukan pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam, dan juga dapat bekerjasama juga dengan dinas perdagangan yang dapat memengaruhi dalam proses penyediaan pengganti plastik/ramah lingkungan serta melakukan kerjasama dengan produsen-produsen non plastik sehingga pengganti plastik dan styrofoam bisa di dapatkan dengan mudah oleh masyarakat dengan harga terjangkau.
2. Perlu adanya peningkatan sosialisasi, pengontrolan, evaluasi dan adanya pemberlakuan pemberian penghargaan dan sanksi dalam proses pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam yang dilakukan secara berkala karena berdasarkan temuan dilapangan sosialisasi, pengontrolan dan evaluasi hanya dilaksanakan sekitar 6 bulan sampai satu tahun ketika Perbup No.13 tahun 2019 diberlakukan.
  3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor diharapkan dapat melakukan pengembangan perberlakuan sasaran pada pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam yang tidak hanya diberlakukan pada pihak swasta/ pelaku usaha yang meliputi pusat perbelanjaan, toko modern, restaurant, hotel dan café, malainkan harus diberlakukan juga pada pasar-pasar tradisional, para pelaku usaha yang tergabung dalam Dinas UMKM dan para pelaku usaha yang tergabung dalam marketplace (toko online yang pengirimannya memakai jasa ekspedisi) karena sejauh ini pengurangan penggunaan plastik baru sekitar 15% diharapkan dengan adanya pengembangan sasaran dapat meningkat dengan signifikan dalam pengurangan penggunaan plastik dan styrofoam.
  4. Tedapatnya komitmen yang kuat antara pimpinan daerah dan pimpinan pusat dalam mengurangi penggunaan plastik dan styrofoam melalui pembangunan produksi-produksi non-plastik ataupun pabrik-pabrik non-plastik sehingga dapat membangun produsen-produsen anti-plastik yang dapat memunculkan pengganti produk plastik. Dengan demikian maka terdapatnya ketersediaan produk non-plastik sehingga konsumen dapat lebih mudah mendapatkan produk yang ramah lingkungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, & Gash. (2007). Collaborative governance in theory and practice, journal of public administration research and theory. published by oxford university press.
- Arrozaaq, D. L. C. (2016). Collaborative governance (studi tentang kolaborasi antar stakeholders dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sidoarjo). Kebijakan Dan Manajemen Publik, 3, 1-13. <http://repository.unair.ac.id/67685/>
- Bachtiar, Y. (2021). Analisis Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Kota Bogor. *Jurnal Syarikah*, 7(2).
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1-29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan. *Wedana Jurnal Pemerintah, Politik Dan Birokrasi*, 1, 200-208. <http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824>
- Hermawan, L. (2021). *Kolaborasi Antar Instansi Pemerintah Kota Bogor Dalam*

*Aplikasi SALUR Untuk Penyaluran Bantuan Sosial Saat Pandemi Covid-19.* Pascasarjana Universitas Djuanda.

- Hidayanti, D. R., & Efendi, D. (2020). Praktik collaborative governance dalam pengelolaan sampah. 2(1), 34–40.
- Islami, S. S., Purnamasari, I., & Seran, G. G. (2020). Implementasi kebijakan peraturan wali kota bogor nomor 61 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Bogor. *Jurnal Governansi*, 6(1), 1–8. <https://doi.org/10.30997/jgs.v6i1.2566>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2009). Analisis data kualitatif. Jakarta: UI-Press.
- Moleong, L. J. (2018). Metode penelitian kualitatif (38th ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morse, R. S., & Stephens, J. B. (2012). Teaching collaborative governance: phases, competencies, and case-based learning. *Journal of Public Affairs Education*, 18(3), 565–584.
- Nasution, R. S. (2015). Berbagai cara penanggulangan limbah plastik. *Journal of islamic science and technology*, 1(1), 97–104. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/elkawnie/article/view/522>. Diakses 01 Januari 2021
- Normajatun, & Haliq, A. (2020). Kebijakan Pemerintah Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik Di Pasar Tradisional Kota Banjarmasin. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan ...*, 5(2), 55–63. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Asy/article/view/3517>
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kualitatif (Edisi Ke-3). Bandung: ALFABETA.
- Suyanto, B. (2005). Metode penelitian sosial. Jakarta: Kencana prenda media group.
- Trisniati, E., Cadith, J., Nugroho, K. S., Publik, S. A., Ageng, S., & Banten, T. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. *Jurnal GOVERNANSI*, p-ISSN 2442-3971 e-ISSN 2549-7138, 8(April), 59–68.
- Utami, F. A., Firdaus, D. R. S., & Martha, L. P. (2020). Efektivitas Kampanye Program Bogor Tanpa Kantong Plastik Dalam Membangun Kepedulian Masyarakat Pada Lingkungan. *Jurnal Penelitian Sosial Ilmu Komunikasi*, 4(2), 102–112.
- Wahyudin, C., Apriliani, A., Ramdani, F. T., Pratidina, G., & Seran, G. G. (2023). A BIBLIOMETRIC ANALYSIS COLLABORATIVE GOVERNANCE OF PLASTIC REDUCTION THROUGH THE TRANSFORMATION INDUSTRY. *Journal of Engineering Science and Technology*, 18(4), 85–93.